

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia berperan besar dalam penyelesaian konflik di Rakhine-State. Hal itu bisa dilihat dari seriusnya Indonesia dalam menengahi konflik di Rakhine. Dalam menangani konflik tersebut, Indonesia bisa dibilang sangat inklusif. Bisa dilihat dari penggunaan diplomasi preventif dibanding mengutuk Myanmar terkait Rohingya. Indonesia paham betul jika Indonesia menekan Myanmar maka Myanmar bisa bersifat tertutup kepada Indonesia yang justru malah menyulitkan dalam membantu Rohingya.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menunjukkan peran aktif dan signifikan baik secara bilateral, multilateral maupun regional membahas dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konflik Rohingya, baik di PBB, ASEAN, OKI, dan organisasi-organisasi internasional yang lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga secara aktif dan inklusif mengirimkan delegasi-delegasi negara, yakni Menlu Marty Natalegawa beserta jajarannya, untuk selalu berdiplomasi, memantau, dan mengambil kebijakan yang terbaik bagi penyelesaian konflik Rohingya bersama tokoh-tokoh negara baik yang berada di dalam pemerintahan Myanmar maupun yang berada di luar

Myanmar, serta organisasi-organisasi internasional seperti OKI, PBB, dan sebagainya.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia tidak kalah menunjukkan peran aktifnya dalam membantu meredakan Konflik Rohingya. Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi untuk mendengar penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pertemuan ini, Suu Kyi menjelaskan kompleksitas kejadian yang terjadi di Rakhine. Ia pun berjanji akan terus memberikan informasi terbaru mengenai kondisi di Rakhine. Langkah Indonesia untuk mengupayakan penyelesaian masalah Rakhine State di Myanmar mendapatkan sorotan dari media internasional. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengusulkan kepada pemerintah Myanmar formula 4+1 sebagai solusi untuk mengatasi masalah keamanan dan kemanusiaan di Rakhine State. Dalam pertemuan ini, Menlu RI menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.

Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Menlu RI menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Menlu RI menyampaikan bahwa baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan 3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda

urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.

Baik pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, keduanya menunjukkan peran aktif untuk membantu dan menengahi konflik yang ada di Rakhine. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sukses sebagai mediator-integrator untuk meredakan – jika tidak bisa disebut penyelesaian- konflik klasik Rohingya yang terus berulang. Berbagai upaya pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo menunjukkan adanya kepedulian terhadap isu Rohingya yang kemudian terefleksi terhadap kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, kemudian menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mengimplementasikan peran aktif sebagai mediator-integrator dalam upaya penyelesaian konflik antar-etnis yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.